

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan semakin luasnya perekonomian global, membuat persaingan dalam dunia bisnis semakin kompleks. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dengan para kompetitornya, dengan meningkatkan laba perusahaan. Laba menjadi tolak ukur yang penting atas pengembangan usaha dan menjaga kontinuitas jalannya perusahaan.

Dalam mengembangkan usahanya, perusahaan memerlukan pihak ketiga seperti investor, pemberi pinjaman, pemasok atau kreditor usaha guna menambah modal bagi perusahaan. Pihak ketiga tersebut memerlukan alat yang mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oleh sebab itulah, perusahaan memerlukan pihak independen yaitu auditor untuk menilai apakah laporan keuangan yang mereka susun telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Tidak hanya itu, auditor memiliki kewajiban dalam menyampaikan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). *Going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017:5).

Banyak kritikan dan sorotan ditujukan pada profesi akuntan publik ketika terungkapnya kasus manipulasi laporan keuangan seperti yang terjadi pada kasus Enron dan KAP Arthur Anderson. Kasus Enron dan WorldCom merupakan salah satu dari kegagalan auditor dalam pemberian opini audit. Dalam kasus ini, KAP Arthur Anderson memanipulatif laporan keuangan dengan menunjukkan seolah-

olah kinerja perusahaan dalam keadaan yang baik padahal perusahaan saat itu tengah menanggung hutang yang besar. Andersen telah kehilangan kepercayaan dari pihak *stock holder* untuk memberikan suatu informasi yang adil mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah. (Ramadhan, Fuad. 2014)

Di Indonesia kasus terkait dengan *going concern* yang terjadi adalah pada maskapai indonesia yaitu Batavia air, Batavia Air yang tidak bisa membayar hutang sebesar \$4,68 juta yang jatuh tempo pada 13 desember 2012, karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, pihak kreditor mengajukan pailit kepada Batavia Air. Dimana saat sebelum Batavia Air mengalami kebangkrutan, laporan keuangannya menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek serta jangka panjang, dan arus kas dalam kondisi baik. Laporan keuangan pun mendapatkan opini audit yang wajar tanpa pengecualian dan tidak menerima kualifikasi *going concern* pada tahun 2011. Namun ternyata Batavia Air justru tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*) sehingga mengalami kebangkrutan. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian tiba-tiba berhenti beroperasi (Fauziah, 2014).

Saat perekonomian sedang lesu dan juga mengalami keterlambatan, namun bisnis properti masih menjadi ladang investasi yang menarik untuk orang indonesia. Bisnis properti dan real estate dipandang lebih menguntungkan dalam hal investasi. Dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (9 April 2017) prospek property memang cerah, tak terkecuali apartemen. Daya tarik karena kemudahan akses dan lokasi, ditunjang dengan tingkat kebutuhan hunian yang terus saja meningkat, membuat prospek apartemen tetap melangit. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun tersebut, menjadikan bisnis properti menjadi sangat menguntungkan terutama dalam bidang perumahan. Pemerintah pun ikut andil dalam kebijakan memberikan kredit perumahan bagi masyarakat menengah kebawah.

Namun dilansir dari [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) (9 April 2017) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelesuan bisnis properti, seperti kenaikan harga properti yang lebih tinggi dibandingkan tingkat daya beli masyarakat. Selain itu,

sektor properti sangat dipengaruhi oleh siklus bisnis. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun kontan tahun 2016, hanya sebagian kecil emiten sektor properti yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih di akhir kuartal ketiga. Selebihnya, mayoritas emiten properti mencatatkan penurunan laba bersih.

Beberapa hal yang menjadi penyebab masalah opini *going concern* adalah kondisi perusahaan yang mengalami kerugian besar, rasio hutang yang tinggi dan tidak adanya *action plan* dari pihak manajemen. Kondisi keuangan perusahaan merupakan cerminan atas keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Auditor cenderung tidak memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik, begitu pula dengan kondisi keuangan perusahaan yang buruk maka besar kemungkinan auditor akan memberikan opini audit *going concern* (Syamsuri Rahim, 2016)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) kondisi keuangan perusahaan yang diprosikan dengan menggunakan analisis kebangkrutan altman model diperoleh hasil bahwa, variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun, Hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2019) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari penerimaan opini audit *going concern* adalah dengan melakukan pergantian dan mencari auditor yang mampu mendukung dalam perlakuan akuntansi yang digunakan dalam perusahaan atau yang biasa dikenal dengan *opinion shopping*. Perusahaan yang telah melakukan *opinion shopping* cenderung akan mendapatkan opini audit yang bersih. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Akbar (2019), menyatakan bahwa *opinion shopping* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Pada tahun 2002 PT. KimiaFarma Tbk terbukti melakukan salah saji laporan keuangan akibat adanya *mark up* pencatatan persediaan senilai Rp 32,7 milyar. Kemudian PT. Indofarma melakukan praktik *earning management* dengan menyajikan overstated laba bersih senilai Rp 28,870 milyar, sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut understated. KAP

HTM memang terbukti tidak ikut serta dalam skandal manipulatif yang dilakukan oleh manajemen, namun hal tersebut sebuah kelalaian dalam mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan klien. Hal tersebut menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima laporan yang *fair* dan merusak reputasi profesi akuntan. (Makaminan, 2016)

Sedangkan pada tahun 2005 PT. KAI juga terbukti melakukan salah saji laporan keuangan akibat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor yang memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), padahal pada waktu itu PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp 63 milyar. Terdapat indikasi bahwa perusahaan - perusahaan di atas melakukan *opinion shopping* guna mendapat pernyataan wajar tanpa pengecualian dari auditor.

Kasus “jual beli” opini yang baru - baru ini terjadi yaitu ditangkapnya enam orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan pada 26 Mei 2017. Enam orang yang ditangkap KPK di Gedung BPK yakni, ALS (Ali Sadli) auditor BPK, RS (Rochmadi Saptogiri) eselon I BPK, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon III Kemendes, sekretaris RS, sopir JBP dan 1 orang satpam. Dalam Operasi Tangkap Tangan itu, penyidik KPK juga menemukan uang Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Uang itu diduga kuat terkait suap pada kasus yang berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan lembaga tersebut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, sebagai latar belakangnya, pada Maret 2017 KPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan Kemendes PDDT untuk anggaran 2016. Menurut Laode, dalam rangka memperoleh opini WTP, Sugito melakukan pendekatan ke pihak auditor BPK ([liputan6.com](http://liputan6.com), 2017).

Faktor lain yang berperan penting dalam penerimaan opini audit *going concern* adalah Leverage. *Leverage* merupakan rasio penggunaan hutang sebagai sarana pembiayaan perusahaan, dimana apabila jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah aktiva maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan hal itu dapat menyebabkan kemungkinan yang lebih besar bagi auditor dalam memberikan opini audit *going concern* (Wibisono, 2013). Variabel *leverage* dianggap salah satu faktor penting bagi auditor dalam memberikan opini audit *going concern*.

Seperti dalam kasus perusahaan sector property yang terdaftar dalam BEI yaitu PT Bakrie Developent Tbk. Dalam artikel yang dimuat Merdeka.com (2018) yang berjudul “Utang abadi perusahaan Bakrie” menyebutkan bahwa kelompok Bakrie menggunakan modal untuk membayar atau malkukan ekspansi dengan menjual asset dari anak perusahaan. Daftar panjang perusahaan Bakrie yang sudah dilego sahamnya ke investor lain adalah Seamless Pipe Indonesia Jaya, Bakrie Pipe Indonesia, South East Asian Pipe Indonesia, South East Asian Pipe, Bakrie Construction, Bakrie Building Industries hingga yang terbaru adalah menjual saham PT Energi Mega Persada Tbk.

Meskipun selalu lolos dalam mencari celah dalam persoalan hutang, anak usahanya yang bergerak di bidang properti, PT Bakrieland Development juga digugat pailit oleh The Bank of New York Mellon cabang London terhadap anak usaha Bakrieland yakni BLD Investment Pte yang memiliki utang USD 155 juta. lilitan utang sudah menjerat hampir di seluruh anak usaha perusahaan Bakrie dan sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Gugatan pailit yang dialamatkan ke Bakrieland dan anak usahanya, salah satu dampak dari sistem bisnis perusahaan Bakrie yang bertumpu pada utang.

Menurut artikel yang dimuat dalam CNBC Indonesia, dikarenakan belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2018 sekaligus belum membayar denda keterlambatan pelaporan emiten properti PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) kembali mendapatkan peringatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lebih lanjut, kasus restrukturisasi utang ELTY lainnya terkait obligasi konversi senilai US\$ 155 juta yang diterbitkan anak usaha ELTY yang berbasis di Singapura BLD Investment Ltd (BLDI). Perusahaan bahkan sempat digugat oleh kreditor karena telat membayar kewajibannya.

Namun per kuartal III-2018, utang perusahaan berhasil dilunasi melalui melalui penerbitan waran dan penyerahan 37,9% atau setara 8,56 miliar saham milik Entitas Anak dalam PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE). Melansir laporan keuangan kuartal III-2018 total utang yang masih dimiliki perusahaan mencapai Rp 4,17 triliun. Proporsi pinjaman terbesar berasal dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan GLI dengan nilai masing-masing sebesar Rp 671,48 miliar dan Rp 313,5 miliar. Perusahaan tampaknya sudah mengambil

langkah antisipasi pelunasan utang dengan menyisihkan aset, termasuk kepemilikan saham yang siap dijual, diantaranya hak milik perusahaan atas PT Bakrie Nirwana Semesta dan PT Dwi Makmur Sedaya.

Dalam penelitian Santoso (2013) Leverage dengan diprosikan menggunakan debt rasio memiliki hasil leverage berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio leverage suatu perusahaan, maka akan semakin menimbulkan keraguan auditor akan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, karena sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai hutang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri Rahim (2016) yang berjudul “Pengaruh kondisi keuangan perusahaan, kualitas audit dan *opinion shopping* terhadap penerimaan opini audit *going concern*”. Perbedaan penelitian ini adalah digantinya satu variable dependen kualitas audit menjadi *leverage*. Dalam penelitian ini pula peneliti menggunakan subjek penelitian yang berbeda yaitu sektor properti dan *real estate* untuk tahun 2016-2018.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi Kasus pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut : “ Pengaruh Kondisi Keuangan, *Opinion shopping*, dan *Leverage* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2018 ”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh perumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah kondisi keuangan memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 ?
2. Apakah *opinion shopping* memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 ?

3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 ?
4. Apakah kondisi keuangan, *opinion shopping*, dan *leverage* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setelah mengidentifikasi terhadap latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh kondisi keuangan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2018
2. Untuk membuktikan pengaruh *opinion shopping* terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018
3. Untuk membuktikan pengaruh *leverage* terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018
4. Untuk membuktikan pengaruh kondisi keuangan, *opinion shopping*, dan *leverage* secara bersama-sama terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pada uraian di atas, terdapat manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian pada tahun berikutnya mengenai opini audit *going concern* dan peneliti mengharapkan terdapat mengidentifikasi faktor-faktor lain dalam penerimaan opini audit *going concern*.

2. Bagi lembaga perguruan tinggi

Diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, khususnya Prodi S1 Akuntansi.

3. Bagi Akuntan Publik

Manfaat yang diperoleh oleh akuntan publik khususnya pada bagian auditor adalah dapat memberikan penilaian keputusan opini audit yang mengacu pada opini *going concern* perusahaan di masa yang akan datang.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan - perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia.

5. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan publik yang terdaftar di BEI, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan berinvestasi.